

PENGARUH ELEMEN-ELEMEN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *INTEGRATED REPORTING*

(Studi Empiris pada Perusahaan BUMN Non-Kuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017)

THE EFFECT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE ELEMENTS ON INTEGRATED REPORTING

(An Empirical Study on Non-Financial State Owned Enterprise that Registered on The Indonesia Stock Exchange for 2014-2017)

Vennika Qashash¹, Dini Wahjoe Hapsari², Djusnimar Zultilisna³

Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

¹vennikaqashash@student.telkomuniversity.ac.id ²dinihapsari@telkomuniversity.ac.id ³titi@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Integrated Reporting merupakan laporan yang menggabungkan *Sustainability Report* dan *Annual Report* menggambarkan hubungan antara strategi perusahaan, tata kelola, kinerja keuangan, dan CSR. Sehingga *Integrated Reporting* menyediakan pelaporan yang lebih luas dibandingkan pelaporan tradisional yang ada saat ini dan memberikan manfaat bagi perusahaan untuk lebih transparan dalam pelaporan yang akan meningkatkan kepercayaan *stakeholder*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh elemen-elemen *good corporate governance* terhadap *Integrated Reporting* pada perusahaan BUMN non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017. Elemen-elemen *good corporate governance* diprosikan dengan saham kepemilikan institusional, jumlah anggota dewan direksi, komposisi komisaris independen, dan jumlah anggota komite audit. Penelitian ini menggunakan sampel BUMN non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017 berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, sampel yang diperoleh adalah sebanyak 16 perusahaan, sehingga data penelitian yang dianalisis berjumlah 64 data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan tahunan setiap perusahaan dan setiap tahunnya dengan data yang digunakan adalah data panel. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi data panel serta pengujian hipotesis dengan menggunakan bantuan *software* EViews 10. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, dewan direksi, komisaris independen, dan komite audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Integrated Reporting*. Secara parsial hanya dewan direksi yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Integrated Reporting*, sedangkan kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *Integrated Reporting*.

Kata Kunci: *Kepemilikan Institusional, Dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit, Integrated Reporting*

Abstract

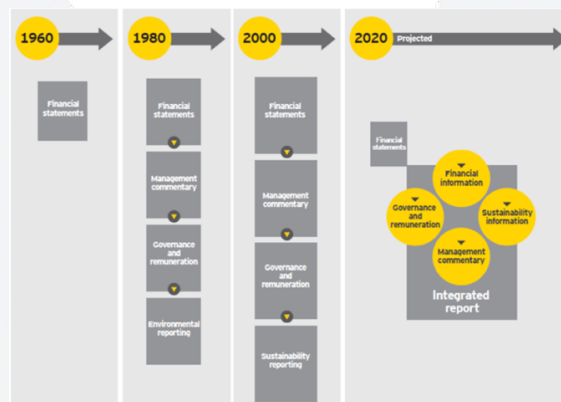
Integrated Reporting is a report that describing the relationship between corporate strategy, governance, financial performance, and CSR. So that the *Integrated Reporting* provides broader reporting than traditional reporting that exists today and provides benefits for companies to be more transparent in reporting that will increase stakeholder trust. This study aims to determine the effect of elements of good corporate governance on the *Integrated Reporting* on non-financial SOE companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2014-2017. The elements of good corporate governance are proxied by institutional ownership shares, number of board members, composition of independent commissioners, and number of audit committee members. This study uses a sample of non-financial SOEs listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2014-2017 period based on predetermined criteria, the samples obtained were 16 companies, so the research data analyzed amounted to 64 data. The type of data used in this study is secondary data in the form of annual reports for each company and annually with the data used is panel data. The data analysis technique used is panel data regression and hypothesis testing using EViews 10 software. Based on the test results, it shows that institutional ownership, board of directors, independent commissioners, and audit committees simultaneously have a significant effect on *Integrated Reporting*. Partially only the board of directors has a positive and significant influence on the *Integrated Reporting*, while institutional ownership, independent commissioners, and audit committees have no effect on the *Integrated Reporting*.

Keywords: *Institutional Ownership, Board of Directors, Independent Commissioners, Audit Committee, Integrated Reporting*

1. Pendahuluan

BUMN mempunyai peranan penting sebagai tulang punggung perekonomian. Terbukti dengan meskipun secara angka hanya lima persen (5%) dari saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia namun saham BUMN kuasai 26,1 persen kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia. Total dana perolehan Emiten BUMN non- keuangan ini adalah 30 persen dari total selama IPO (PT Indopremier Sekuritas, 2017). Hal ini mendorong pengelolaan BUMN untuk lebih efisien dan diharapkan tingkat transparansi informasi juga meningkat sehingga di masa depan akan tetap dipercaya serta menambah daftar BUMN di Bursa Efek Indonesia.

Dalam era globalisasi perkembangan informasi dituntut untuk berkembang lebih cepat, perkembangan ini secara langsung juga mempengaruhi perkembangan lingkungan ekonomi yang membutuhkan informasi, informasi tersebut antara lain adalah informasi yang diperoleh dari laporan-laporan perusahaan. Laporan tahunan merupakan salah satu sumber informasi yang secara formal dipublikasikan (Ramadani, 2017). Semakin berkembangnya kebutuhan pengambilan keputusan atas suatu perusahaan menimbulkan isu baru dalam akuntansi. Laporan keuangan tidak hanya memenuhi kebutuhan informasi *investor* dan kreditor dalam kapasitas mereka sebagai penyedia sumber daya keuangan perusahaan, tetapi laporan keuangan juga diharapkan dapat memberikan informasi mengenai efek keberadaan perusahaan pada lingkungan sosial dan lingkungan alam. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan sebuah konsep *Integrated Reporting*. *Integrated Report* sendiri didefinisikan sebagai suatu komunikasi yang ringkas dan terintegrasi tentang bagaimana strategi, tata kelola dan remunerasi, kinerja dan prospek suatu organisasi menghasilkan penciptaan nilai dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang. *Integrated Reporting* <IR> memberikan suatu pendekatan pelaporan yang lebih luas dibandingkan dengan pelaporan tradisional yang ada saat ini. (www.accounting.binus.ac.id). Untuk tahun 2000 hingga 2019 *Annual Report* dan *Sustainability Reporting* pelaporannya masih secara terpisah namun untuk di tahun 2020 IIRC merencanakan untuk menggabungkan *Annual Report* dan *Sustainability Reporting*. Berikut merupakan gambaran evolusi pelaporan perusahaan yang dibuat oleh IIRC.



Gambar 1 Evolution of Corporate Reporting

Sumber: IIRC, *Towards Integrated Reporting: Communicating Value in the 21st Century*

Pengungkapan perusahaan yang mengadopsi *Integrated Reporting* <IR> pada dasarnya masih bersifat *voluntary*, karena tidak semua negara telah menetapkan mandat atas *Integrated Reporting* <IR> (Utami, 2016). Di Indonesia sendiri, belum mewajibkan atau membujuk perusahaannya untuk mengadopsi atau menerapkan *Integrated Reporting* <IR> penuh, tetapi perusahaan Indonesia sudah menerbitkan Laporan Tahunan yang menggabungkan informasi keuangan dan non-keuangan (Fadly, 2015). Dengan rencana pergeseran *Sustainability Reporting* ke *Integrated Reporting*, maka perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) harus mempersiapkan diri menyediakan informasi-informasi yang dipersyaratkan dalam *Integrated Reporting* <IR> sehingga ketika Indonesia beralih menggunakan pedoman *Integrated Reporting* <IR> perusahaan-perusahaan tersebut dengan cepat dapat menyesuaikan dengan ketentuan *Integrated Reporting* <IR>.

Penyampaian informasi secara transparan dapat didorong dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance*. Namun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia saat ini relatif tertinggal dibandingkan negara-negara di kawasan ASEAN. Padahal penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik adalah aspek utama untuk membangun fundamental perusahaan yang kokoh dan laporan tahunan yang didukung *Good Corporate Governance* (GCG) akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan *investor*. Hanya dua emiten dari Indonesia yang masuk dalam daftar 50 Emiten Terbaik dalam Praktik *Good Corporate*

Governance (GCG) di ASEAN dalam ajang penganugerahan ASEAN *Corporate Governance Awards* 2015. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam) merupakan perusahaan yang paling baik dalam penyajian laporan keuangan yang mencerminkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Kinerja keuangan perusahaan tidak akan berkelanjutan bila tidak dilandasi oleh praktik-praktik tata kelola yang baik.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut mengenai *Good Corporate Governance* dan *Integrated Reporting*, dan masih terdapat beberapa perbedaan dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Elemen-elemen *Good Corporate Governance* terhadap *Integrated Reporting* (Studi Empiris pada Perusahaan BUMN Non-Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017)”.

2. Dasar Teori dan Lingkup Penelitian

2.1 Dasar Teori

2.1.1 Teori Legitimasi

Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan kedepan. Hal itu, dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengontruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri ditengah lingkungan masyarakat yang semakin maju. Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun non-fisik. (Hadi, 2011:87).

Hasil penelitian Lightstone and Driscoll (2008), menyatakan bahwa perusahaan yang menggunakan *ethical language* untuk menginformasikan kondisi perusahaan merupakan perusahaan yang dapat pendapat legitimasi dari publik. Hal ini terjadi ketika perusahaan dengan sukarela mengungkapkan berita baik dan berita buruk secara bersamaan maka akan memberikan ekspektasi positif dari stakeholder.

Perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga mereka diterima oleh masyarakat.

2.1.2 Teori Keagenan

Konsep *agency theory* menurut Anthony dan Govindarajan dalam Siagian (2011:10) adalah hubungan atau kontak *principal* dan *agent*. Tata cara pemungutan pajak menggunakan *self assessment system* akan berhasil dengan baik apabila masyarakat memiliki pengetahuan dan disiplin terhadap perpajakan. Dalam hal ini pemilik perusahaan mendelegasikan kewenangannya kepada pihak manajemen untuk menjalankan pekerjaan atas nama pemilik. Pada prakteknya di dalam perusahaan sering terjadi konflik yang disebut *agency conflict* disebabkan pihak-pihak yang terkait yaitu *principal* dan *agent* mempunyai kepentingan yang saling bertentangan. Perbedaan kepentingan dan tujuan antara *agent* dan *principal* dapat membawa *agent* salah mewakili informasi kepada *principal*. Konflik antara *agent* dan *principal* di dalam perusahaan terkadang tidak dapat dihindari sehingga dapat menimbulkan *agency problem* (Jensen & Meckling, 1976).

Healy et al. (2000) dalam Termeulen (2011, 23) menawarkan beberapa cara untuk mengurangi permasalahan keagenan yaitu:

1. *Contracting*
2. *Disclosing*
3. *Corporate Governance*
4. *Information Intermediaries*
5. *Corporate Control Contest*

2.1.3 Teori Pemangku Kepentingan

Freeman (1983) dalam Ginting (2012:17) menyatakan bahwa perusahaan harus mampu mengidentifikasi kepentingan *stakeholder* yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Kelangsungan hidup perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh *shareholder* akan tetapi juga *stakeholder* lain. *Stakeholder* memiliki harapan bahwa perusahaan dapat memberikan informasi terkait operasi perusahaan secara transparan dan akuntabilitas. Perusahaan mampu mengungkapkan segala aktivitasnya baik yang berhubungan dengan kegiatan operasi, lingkungan dan sosial. Salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan tersebut dengan cara penerapan *Integrated Reporting* <IR> (Ahmad, 2017).

2.1.4 Perkembangan Pelaporan

Pelaporan perusahaan mengalami perubahan dari *Financial Reporting* sampai dengan *Integrated Reporting* (Savitz & Weber, 2013:226). *Financial Reporting* merupakan bentuk pelaporan yang hanya menyajikan informasi item keuangan dengan mengabaikan informasi yang mendasari informasi keuangan tersebut, seperti informasi tentang sosial, lingkungan.

Untuk melengkapi *Financial Reporting*, maka bentuk pelaporan berubah menjadi *Management Reporting* yang menyajikan informasi keuangan dan informasi lain yang terkait dengan pengelolaan perusahaan, namun *Management*

Reporting tidak mencakup komitmen maupun bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Kepedulian terhadap lingkungan mendorong perubahan bentuk pelaporan menjadi *Green Reporting*, yang menyajikan pelaporan keuangan namun juga menitikberatkan pada pelaporan CSR. Namun demikian, *Green Reporting* masih disajikan secara terpisah dan belum memperlihatkan kesinambungan dari tahun ke tahun sehingga mendorong bentuk pelaporan berubah menjadi *Sustainability Reporting* (SR). (Kustiani, 2016).

Dalam rangka menyempurnakan bentuk pelaporan, maka perlunya pengembangan menjadi model terintegrasi yang dikenal dengan *Integrated Reporting* yaitu dengan menggabungkan *Sustainability Reporting* dan *Financial Reporting* (Aziz, 2014).

2.1.5 *Integrated Reporting*

Definisi *Integrated Reporting* <IR> menurut IIRC (2013) pada *IR Framework* tahun 2013 adalah komunikasi yang ringkas tentang bagaimana strategi organisasi, *governance*, kinerja dan prospek, dalam konteks lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan nilai jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Selain berisi tentang informasi keuangan, *Integrated Reporting* juga berisi informasi lainnya yang relevan dengan organisasi. Menurut (Busco & Mark L., 2013) *Integrated Reporting* adalah proses yang menghasilkan komunikasi melalui penciptaan nilai laporan tahunan dari waktu ke waktu.

Integrated Reporting mencakup delapan elemen (*content elements*) yang saling berhubungan dan tidak *mutually exclusive* (saling meniadakan). Informasi disajikan dengan memperhatikan berhubungan antar *content elements* yaitu:

1. *Organizational overview and operating context*
2. *Governance*
3. *Business model*
4. *Risk and opportunities*
5. *Strategy and resource allocation*
6. *Performance*
7. *Outlook*
8. *Basis of Presentation*

2.1.6 *Good Corporate Governance*

Definisi *good corporate governance* menurut Cadbury Committee of United Kingdom dalam Agoes dan Ardana (2013), *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Corporate governance mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan, termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer, dan semua anggota *stakeholders*. Dengan pembagian tugas hak dan kewajiban serta ketentuan dan prosedur pengambilan keputusan penting, perusahaan mempunyai pegangan bagaimana menentukan sasaran usaha dan strategi untuk mencapai sasaran tersebut.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2006) dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia, GCG adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara.

GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha.

2.1.7 *Kepemilikan Institusional*

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh lembaga-lembaga resmi, seperti perusahaan asuransi, yayasan, bank dan lembaga lainnya. Adanya kepemilikan saham oleh investor institusi mampu mengontrol dan mengarahkan manajer dalam pembuatan kebijakan dan keputusan perusahaan sehingga kepemilikan institusional diasumsikan dapat mengurangi *agency conflict* (Soflamira & Asandimitra, 2017).

Peningkatan kepemilikan institusional menyebabkan pengawasan yang ketat oleh pihak institusi terhadap kinerja manajemen sehingga secara otomatis manajemen akan menghindari perilaku yang merugikan prinsipal. Institusi biasanya dapat menguasai mayoritas saham karena mereka sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan pemegang saham lainnya (Novaridha, 2017). Pengawasan dari pihak institusional tentunya akan menjamin kemakmuran pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekankan melalui investasi mereka yang cukup besar di pasar modal.

2.1.8 Dewan Direksi

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /PJOK.03/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik pasal 1, dewan direksi adalah organ emiten atau perusahaan publik yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan emiten atau perusahaan publik untuk kepentingan emiten atau perusahaan publik, sesuai dengan maksud dan tujuan serta mewakili emiten atau perusahaan publik, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/PJOK.03/2014 pasal 2, direksi emiten atau perusahaan publik paling kurang terdiri dari dua orang anggota direksi. Satu diantara anggota direksi diangkat menjadi direktur utama atau presiden direktur. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama.

Dewan direksi memiliki tugas untuk menentukan arah kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

2.1.9 Komisaris Independen

Komisaris independen menurut Ketentuan Bapepam No. Kep 29/PM/2004 adalah: “Anggota komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung melalui emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik serta tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.”

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/PJOK 04/2017 pasal 19, Dewan komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang, persentasi jumlah komisaris independen wajib paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Sebagai contoh jika perusahaan hanya memiliki satu anggota dewan komisaris, maka anggota dewan komisaris dimaksud merupakan komisaris independen. Jika perusahaan memiliki dua anggota dewan komisaris, maka salah satu anggota dewan komisaris yang dimaksud merupakan komisaris independen.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/PJOK 04/2017 pasal 23, komisaris independen mempunyai tugas pokok yaitu melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan debitur, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Komisaris Independen dalam tata kelola perusahaan dapat memberikan tekanan perusahaan untuk mengungkapkan pelaporan terintegrasi yang lebih luas untuk mewujudkan prinsip GCG yaitu *responsibility* (Ahmad, 2017).

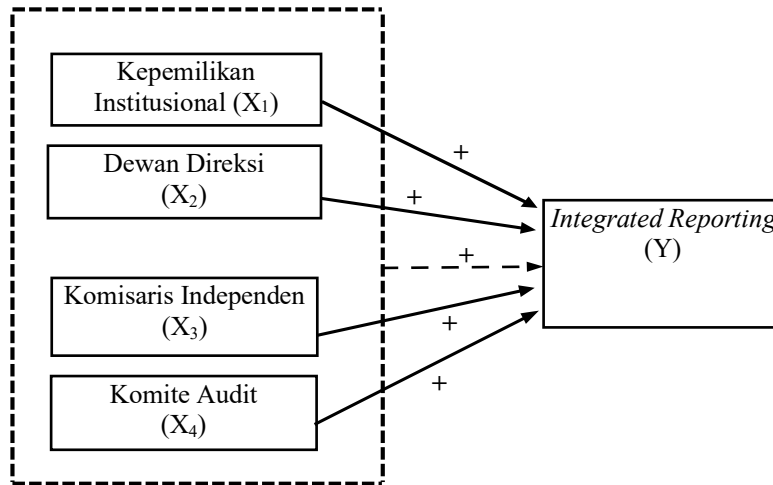
2.1.10 Komite Audit

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/PJOK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Pasal 1, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.

Menurut Rezaee (2009), Dalam hal pelaporan keuangan peran dan tanggung jawab komite audit adalah memonitor dan mengawasi audit laporan keuangan dan memastikan agar standar dan kebijaksanaan keuangan yang berlaku terpenuhi, memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar dan kebijaksanaan tersebut dan apakah sudah konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota komite audit, serta menilai mutu pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan auditor eksternal.

Semakin tinggi kualitas audit maka pertanggungjawaban manajemen perusahaan dapat dipercaya, sehingga akan meningkatkan kepercayaan dari pelaku pasar modal serta tanggung jawab komite audit dalam melindungi pemegang saham minoritas dapat meyakinkan investor untuk mempercayakan investasinya kepada perusahaan tersebut (Andayani & Kusumaningtyas, 2015).

2.2 Kerangka Pemikiran



Keterangan:

- : Parsial
- - - - -> : Simultan

Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Sumber: olahan penulis (2019)

Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini memiliki hipotesis sebagai berikut:

- H₁ : Kepemilikan Institusional, Dewan Direksi, Komisaris Independen, dan Komite Audit secara simultan berpengaruh terhadap *Integrated Reporting*.
- H₂ : Kepemilikan Institusional secara parsial berpengaruh dan memiliki hubungan positif terhadap *Integrated Reporting*.
- H₃ : Dewan Direksi secara parsial berpengaruh dan memiliki hubungan positif terhadap *Integrated Reporting*.
- H₄ : Komisaris Independen secara parsial berpengaruh dan memiliki hubungan positif terhadap *Integrated Reporting*.
- H₅ : Komite Audit secara parsial berpengaruh dan memiliki hubungan positif terhadap *Integrated Reporting*.

3. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah perusahaan BUMN non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017. Metode penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan kriteria perusahaan BUMN non-keuangan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2017, yang mempublikasikan laporan tahunan periode 2014-2017, dan yang memiliki data yang lengkap terkait dengan kepemilikan institusional, dewan direksi, komisaris independen, dan komite audit. Terdapat 64 sampel yang memenuhi kriteria.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi data panel dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_{1it} + b_2X_{2it} + b_3X_{3it} + b_4X_{4it} + e$$

Keterangan

- | | | | |
|----------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Y | : <i>Integrated Reporting</i> | X ₁ | : Kepemilikan Institusional |
| α | : Konstanta | X ₂ | : Dewan Direksi |
| X ₃ | : Komisaris Independen | b _(1...4) | : Koefisien Slope |
| X ₄ | : Komite Audit | e | : Error term |
| i | : Jenis Perusahaan | t | : Waktu |

4. Pembahasan

4.1 Statistik Deskriptif

Tabel 2 Hasil Statistik Deskriptif

	PI	DD	KI	KA	IR
N	64	64	64	64	64
Minimum	0,0015	3,0000	0,0700	2,0000	0,5794
Maximum	0,9014	9,0000	0,6000	7,0000	0,9286
Mean	0,2076	5,9687	0,3718	3,9375	0,7808
Std. Deviation	0,1538	1,3329	0,0908	1,1802	0,0749

Sumber: Data sekunder yang telah diolah (2019)

Dari hasil pengujian statistik deskriptif di atas dapat disimpulkan bahwa pada variabel Y *Integrated Reporting*, variabel X1 (Kepemilikan Intitusional), X2 (Dewan Direksi), X3 (Komisaris Independen), dan X4 (Komite Audit) nilai *mean* lebih besar dibandingkan nilai standar deviasinya sehingga data tersebut tidak bervariasi atau mengelompok.

4.2 Pemilihan Model Data Panel

4.2.1 Uji Chow

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan antara model *fixed effect* atau *common effect* yang paling tepat digunakan dalam penelitian.

Tabel 3 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	7.296755	(15,44)	0.0000
Cross-section Chi-square	79.948399	15	0.0000

Sumber: Data sekunder yang telah diolah (2019)

Hasil uji chow menunjukkan nilai *probability* (p-value) cross section F sebesar $0,0000 < 0,05$. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan menerima H_1 sehingga model regresi yang tepat digunakan adalah *fixed effect*. Karena uji chow menunjukkan hasil *fixed effect*, maka harus melakukan uji hausman.

4.2.2 Uji Hausman

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan antara model *fixed effect* atau *random effect* yang paling tepat digunakan dalam penelitian.

Tabel 3 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.093033	4	0.5424

Sumber: Data sekunder yang telah diolah (2019)

Hasil uji hausman test menunjukkan nilai *probability* (p-value) *cross section random* sebesar $0,5424 > 0,05$. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak sehingga model regresi yang tepat digunakan adalah *random effect*. Karena hasil pengujian chow dan pengujian hausman berbeda, selanjutnya harus dilakukan uji yang terakhir yaitu uji lagrange multiplier.

4.2.3 Uji Lagrange Multiplier

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan antara model *random effect* atau *common effect* yang paling tepat digunakan dalam penelitian.

Tabel 3 Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange multiplier (LM) test for panel data
Date: 06/16/19 Time: 22:06
Sample: 2014 2017
Total panel observations: 64
Probability in ()

Null (no rand. effect) Alternative	Cross-section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	29.42500 (0.0000)	1.301574 (0.2539)	30.72657 (0.0000)
Honda	5.424481 (0.0000)	-1.140865 (0.8730)	3.028974 (0.0012)
King-Wu	5.424481 (0.0000)	-1.140865 (0.8730)	1.173072 (0.1204)
GHM	-- --	-- --	29.42500 (0.0000)

Sumber: Data sekunder yang telah diolah (2019)

Hasil uji lagrange multiplier menunjukkan nilai *cross section* pada Breusch Pagan sebesar $0,0000 < 0,05$. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga model regresi yang tepat digunakan adalah *random effect*, oleh karena itu tidak perlu melakukan uji asumsi klasik.

4.3 Persamaan Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil pengujian model regresi data panel yang paling tepat digunakan adalah model *random effect*. Hasil uji menggunakan model *random effect* dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4 Hasil Uji Model Random Effect

Dependent Variable: Y
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 06/16/19 Time: 21:57
Sample: 2014 2017
Periods included: 4
Cross-sections included: 16
Total panel (balanced) observations: 64
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.609543	0.062932	9.685767	0.0000
X1	0.039238	0.049077	0.799525	0.4272
X2	0.017439	0.007169	2.432507	0.0180
X3	0.150368	0.086120	1.746032	0.0860
X4	0.000802	0.007517	0.106754	0.9153

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.059015	0.6613
Idiosyncratic random		0.042239	0.3387

Weighted Statistics			
R-squared	0.147377	Mean dependent var	0.263095
Adjusted R-squared	0.089572	S.D. dependent var	0.043926
S.E. of regression	0.041913	Sum squared resid	0.103644
F-statistic	2.549560	Durbin-Watson stat	1.809458
Prob(F-statistic)	0.048472		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.172692	Mean dependent var	0.780841
Sum squared resid	0.292831	Durbin-Watson stat	0.640437

Sumber: Data sekunder yang telah diolah (2019)

Berdasarkan hasil output didapat nilai persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$Y = 0,6095 + 0,0392PI + 0,0174DD + 0,1504KI + 0,0008KA + e$$

Rumus analisis regresi data panel di atas dapat diartikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 0,6095 menunjukkan bahwa jika variabel kepemilikan institusional, dewan direksi, komisaris independen, dan komite audit bernilai 0, maka nilai *Integrated Reporting* adalah sebesar 0,6095.
2. Nilai koefisien regresi sebesar 0,0392 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel kepemilikan institusional, maka *Integrated Reporting* mengalami kenaikan sebesar 0,0392 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.
3. Nilai koefisien regresi sebesar 0,0174 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel dewan direksi, maka *Integrated Reporting* mengalami kenaikan sebesar 0,0174 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.
4. Nilai koefisien regresi sebesar 0,1504 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel komisaris independen, maka *Integrated Reporting* mengalami kenaikan sebesar 0,1504 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.
5. Nilai koefisien regresi sebesar 0,0008 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel komisaris independen, maka *Integrated Reporting* mengalami kenaikan sebesar 0,0008 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.

4.3 Pengujian Hipotesis

A. Pengujian Simultan (Uji F)

Tabel 5 Hasil Pengujian Simultan (Uji F)

Dependent Variable: Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 05/20/19 Time: 06:15
 Sample: 2014 2017
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 16
 Total panel (balanced) observations: 64
 Swamy and Arora estimator of component variances

Weighted Statistics			
R-squared	0.147377	Mean dependent var	0.263095
Adjusted R-squared	0.089572	S.D. dependent var	0.043926
S.E. of regression	0.041913	Sum squared resid	0.103644
F-statistic	2.549560	Durbin-Watson stat	1.809458
Prob(F-statistic)	0.048472		

Sumber: Data primer yang telah diolah (2019)

Berdasarkan hasil pengujian yang terdapat pada tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,0485. Hal tersebut menunjukkan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya bahwa Kepemilikan Institusional, Dewan Direksi, Komisaris Independen, dan Komite Audit secara simultan berpengaruh positif terhadap variabel dependen yaitu *Integrated Reporting*.

B. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Dependent Variable: Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 05/20/19 Time: 06:15
 Sample: 2014 2017
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 16
 Total panel (balanced) observations: 64
 Swamy and Arora estimator of component variances

Weighted Statistics			
R-squared	0.147377	Mean dependent var	0.265252
Adjusted R-squared	0.089572	S.D. dependent var	0.044015
S.E. of regression	0.041913	Sum squared resid	0.105069
F-statistic	2.549560	Durbin-Watson stat	1.801482
Prob(F-statistic)	0.048472		

Sumber: Data primer yang telah diolah (2019)

Berdasarkan hasil pengujian yang terdapat pada tabel diatas diketahui bahwa nilai *adjusted R-squared* yang diperoleh pada penelitian ini sebesar 0,090 atau 9% sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang terdiri dari Kepemilikan Institusional, Dewan Direksi, Komisaris Independen, dan Komite Audit hanya dapat menjelaskan variabel dependen yaitu *Integrated Reporting* sebesar 9%, sedangkan sisanya sebesar 91% dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak termasuk pada penelitian ini.

C. Pengujian Parsial (Uji T)

Tabel 6 Hasil Pengujian Parsial (Uji t)

Dependent Variable: Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 06/16/19 Time: 21:57
 Sample: 2014 2017
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 16
 Total panel (balanced) observations: 64
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.609543	0.062932	9.685767	0.0000
X1	0.039238	0.049077	0.799525	0.4272
X2	0.017439	0.007169	2.432507	0.0180
X3	0.150368	0.086120	1.746032	0.0860
X4	0.000802	0.007517	0.106754	0.9153

Sumber: Data primer yang telah diolah (2019)

Berdasarkan hasil pengujian parsial dapat dilihat bahwa setiap variabel independen memiliki nilai signifikansi yang berbeda. Pada variabel kepemilikan institusional memiliki nilai signifikansi 0,4272. Hal tersebut menunjukkan nilai signifikansi tersebut lebih dari 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya bahwa kepemilikan institusional secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Integrated Reporting*. Berapapun investasi oleh pihak institusi pada perusahaan tidak mempengaruhi keputusan perusahaan untuk mengungkapkan

Integrated Reporting. Dikarenakan para investor institusional belum menekan perusahaan untuk melakukan pelaporan tahunan yang terintegrasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novaridha (2017), yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *Integrated Reporting*.

Pada variabel dewan direksi memiliki nilai signifikansi 0,018. Hal tersebut menunjukkan nilai signifikansi tersebut kurang dari 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak yang artinya bahwa dewan direksi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Integrated Reporting*. Dewan direksi memiliki tugas untuk menentukan arah kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Tugas dewan direksi tersebut sejalan dengan tujuan adanya *Integrated Reporting* yaitu mendukung pemikiran terintegrasi, pengambilan keputusan dan tindakan yang fokus pada penciptaan nilai, baik dalam jangka waktu pendek, menengah dan panjang. Dewan direksi masing-masing mempunyai tanggung jawab pekerjaan berbeda, sehingga masing-masing harus dilaporkan tanggung jawabnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Idah (2013), yang menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Sustainability Report*.

Pada variabel komisaris independen memiliki nilai signifikansi 0,086. Hal tersebut menunjukkan nilai signifikansi tersebut lebih dari 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak yang artinya bahwa komisaris independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Integrated Reporting*. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas tugas komisaris independen secara umum adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan jalannya perusahaan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada direksi. Karena hal tersebut komisaris independen hanya mengawasi dewan direksi sebagai pelaksana jalannya manajemen, sehingga komisaris independen tidak mempengaruhi pengungkapan *Integrated Reporting*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasanah et al. (2015), yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*.

Pada variabel komite audit memiliki nilai signifikansi 0,9153. Hal tersebut menunjukkan nilai signifikansi tersebut lebih dari 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak yang artinya bahwa komite audit secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Integrated Reporting*. Berdasarkan tugasnya, komite audit hanya menelaah informasi keuangan dan akuntansi yang akan dikeluarkan perusahaan atau informasi yang sifatnya *mandatory*, karenanya komite audit tidak terlalu memperhatikan informasi yang sifatnya *voluntary*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasanah et al. (2015), yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional, dewan direksi, komisaris independen, dan komite audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Integrated Reporting*. Kepemilikan institusional secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Integrated Reporting*. Dewan direksi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Integrated Reporting*. Komisaris independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Integrated Reporting*. Komite audit secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Integrated Reporting*.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan kajian dibidang yang sama, dapat menambah atau memilih variabel independen lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini namun memiliki kemungkinan pengaruh terhadap *Integrated Reporting*. Variabel independen lain yang disarankan adalah Kepemilikan Keluarga, Kepemilikan Publik, Kepemilikan Pemerintah, dan Kepemilikan Asing. Kemudian disarankan melakukan penelitian dengan menggunakan pengukuran dewan direksi lain selain jumlah anggota seperti diversifikasi gender, latar belakang pendidikan, dan jumlah rapat dan penelitian selanjutnya menggunakan objek selain perusahaan BUMN.

Selanjutnya diharapkan perusahaan memperluas wawasan dan meningkatkan *Integrated Reporting*. Agar jika nantinya *Integrated Reporting* sudah menjadi *mandatory* perusahaan siap. Serta Diharapkan investor memperhatikan aspek *Integrated Reporting* yang ada di suatu perusahaan sebelum berinvestasi.

Daftar Pustaka

- Ahmad, R. (2017). Pengaruh Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Ukuran Kap Terhadap Tingkat Keselarasan Laporan Tahunan Dengan Rerangka *Integrated Reporting*. *NOMINAL*, VI(2), 125-135.
- Aziz, A. (2014, Desember). Analisis Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kualitas Pengungkapan Sustainability Report. *Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura*, 3(2), 65-84.

- BUMN, K. (2017). *Statistik Jumlah BUMN*. Retrieved from Kementrian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia: <http://bumn.go.id/halaman/0-Statistik-Jumlah-BUMN>
- CNN. (2017, September 20). *OJK: Praktik GCG Perusahaan Indonesia Masih Tertinggal*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170920070153-78-242846/ojk-praktik-gcg-perusahaan-indonesia-masih-tertinggal>
- Fadly. (2015, Desember 3). *Integrated Reporting: Sebuah Pendekatan Baru dalam Pelaporan Nilai Perusahaan*. Retrieved from Jago Akuntansi: <https://jagoakuntansi.com/2015/12/03/integrated-reporting-sebuah-pendekatan-baru-dalam-pelaporan-nilai-perusahaan/>
- Jensen, & Meckling. (1976). The Thoery of The Firm: Manajerual Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial and Economics* 3, 305-360.
- Kustiani, N. A. (2016, Maret). Penerapan Elemen-Elemen Integrated Reporting Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Info Artha*, 3, 43-60.
- Lightstone, K., & Driscoll, C. (2008). Disclosing Elements of Disclosure: A Test of Legitimacy Theory and Company Ethics. *Canadian Journal of Administrative Sciences*, 25, 7-21.
- Navi, B. S. (2014). Presentation of Financial and Non-Financial Performance in Integrated Reporting: A Study. *International Journal of Applied Financial Management Prespectives*, 751-755.
- Novaridha, I. A. (2017). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Elemen-Elemen Integrated Reporting. *JOM Fekon*, 3399-3411.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /PJOK.03/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik pasal 1. (2014).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /PJOK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit pasal 1. (n.d.).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/PJOK 04/2017. (n.d.).
- PT Indopremier Sekuritas. (2017, Desember 22). *BEI: Emiten BUMN Kuasai 26,1 Persen Kapitalisasi Pasar*. Retrieved from www.indopremier.com
- Rezaee, Z. (2009). *Corporate Governance and Ethics*. USA: John Wiley & Sons Inc.
- Sari, M. P. (2013). Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sustainability Report. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 2(3), 1-10.
- Surya, I., & Yustiavandana, I. (2008). *Penerapan Good Corporate Governance (Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha)*. Jakarta: KENCANA.
- The International Integrated Reporting Council (IIRC). (2013).
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan . (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. (n.d.).
- www.accounting.binus.ac.id. (2017, Desember 21). *Integrated Reporting: Inovasi Paradigma Baru Bagi Pelaporan Kinerja Perusahaan*. Retrieved From Binus University Faculty of Economic & Communication: <https://accounting.binus.ac.id/2017/12/21/integrated-reporting-inovasi-paradigma-baru-bagi-pelaporan-kinerja-perusahaan/>
- www.cnnindonesia.com. (2017, Februari 25). Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170920070153-78-242846/ojk-praktik-gcg-perusahaan-indonesia-masih-tertinggal>